

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN
ENDROSEMENT DALAM MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

AYU SEPTIANA
NPM. 1621030560

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441H/2020M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN
ENDROSEMENT DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

AYU SEPTIANA
NPM : 1621030560

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs.H.A.Jalaluddin, SH. MM

Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441H/2020M

ABSTRAK

Pajak penghasilan *endrosement* atas pekerjaan selebgram di media sosial *instagram* telah ditetapkan sebagai wajib pajak bagi mereka yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Penghasilan atas kegiatan *endrosement* ditetapkan oleh Dirjen Pajak tanpa adanya peraturan khusus mengenai penghasilan selebgram, hanya sesuai dengan peraturan secara umum tentang pajak penghasilan yang diterima pada pekerja apapun yang mendapatkan penghasilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pajak penghasilan selebgram ini, tentunya layak untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam tinjauan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Persamaan dan Perbedaan Pengenan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial *Instagram* dan Menurut Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial *Instagram*. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial *Instagram* dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial *Instagram*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode penelitian komperatif dengan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder dengan mengumpulkan data menggunakan dokumentasi yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah agenda, media sosial yang terpercaya yang bersumber dari media pajak dan informasi Dirjen Pajak yang ada di media massa dan buku-buku untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Berdasarkan data yang dibahas tentang pajak dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap pajak penghasilan *endrosement*, memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan keduanya yaitu pungutan yang wajib dikeluarkan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan sebagai sumber pemasukan negara. Sedangkan perbedaannya yaitu, Berdasarkan pandangan hukum Islam pemungutan pajak atas penghasilan *endrosement* tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tetapi pajak ada dalam Islam yang disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan dan membebaskan yang bersifat kontemporer dan hanya boleh dipungut ketika baitul mal kosong atau sudah tidak ada harta, serta pemungutannya hanya dibebankan kepada orang kaya. Sedangkan dalam pandangan hukum positif wajib dan harus dilaksanakan karena adanya peraturan yang menagatur berdasarkan undang-undnag No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang mewajibkan adanya wajib pajak orang atau badan yang memperoleh penghasilan dari kegiatan apapun untuk dapat membayar pajak, yang dipungut kepada seluruh warga. apabila tidak membayar atau melaporkan SPT tahunan maka akan medapatkan sanksi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Septiana
Npm : 1621030560
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Endorsement* Dalam Media Sosial *Instagram*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis,

Ayu Septiana
NPM. 1621030560



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PADA KEGIATAN ENDORSEMENT DALAM MEDIA
SOSIAL INSTAGRAM**

Nama

: Ayu Septiana

NPM

: 1621030560

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas

: Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. A. Jalaluddin, SH. MM
NIP. 195703051978031001

Pembimbing II

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN

ENDROSEMENT DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Disusun oleh:

Ayu Septiana, NPM: 1621030560, Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah

(Muamalah). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN

Raden Intan Lampung pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.AG. M. KOM, I

Sekretaris : Arif Fikri, SH, Al. Ag

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.AG. MH

Penguji II : Drs. H. A. Jalaluddin, SH. MM

Penguji III : Khoiruddin, M. S. I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar” (QS. Al-Hujuraat [49]: 15).¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: Diponogoro, 2006), h. 515.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

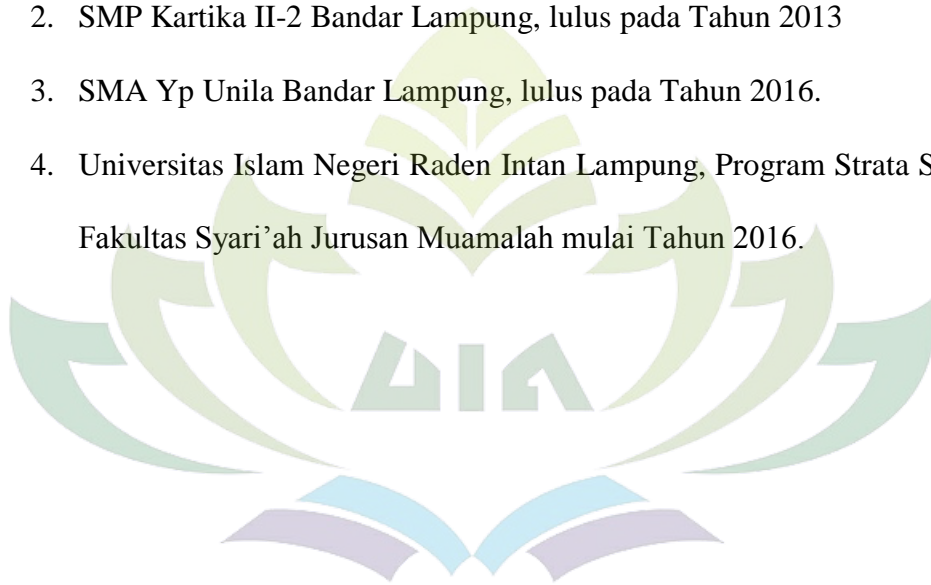
1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Budi Ono dan Ibunda Nur Hasanah yang tulus dan ikhlas mendoakan atas keberhasilanku selama ini dalam pendidikan hingga mengakhiri pendidikan terakhirku di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kedua orang tua angkatku yaitu Ayahanda Supri Yanto dan Nur Aida yang tulus dan ikhlas selalu mendoakanku dan selalu menemaniku selama aku mengejar impianku dalam pendidikan hingga pendidikan terakhirku di UIN Raden Intan Lampung.
3. Saudara-saudara Kandungku yang telah memberikan motivasi dan dukungan terbesar yaitu, Dewi Ismawati serta seluruh keluarga besar. Berkat doa, dan dukungan yang mereka berikan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat Elle, Tihuye dan Kojune yang selalu ada dan menemaniku tanpa lengah sedikitpun hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi oleh Bapak dan Ibu dengan sebutan nama Ayu Septiana. Dilahirkan di Tanjung karang, Bandar Lampung pada tanggal 17 September 1998. Anak kedua dari 3 bersaudara.

Riwayat Pendidikan formal penulis yaitu:

1. SDN 07 Negri Batin, Blambangan Umpu, lulus pada Tahun 2010
2. SMP Kartika II-2 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2013
3. SMA Yp Unila Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S1)
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah mulai Tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial Instagram”** dapat terselesaikan, shalawat dan shalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabatnya serta Pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Studi Program Sarjana Satu (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana SI dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas bantuan semua pihak dalam menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, MA.g. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid., M. H. selaku Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin M. S. I selaku Ketua Prodi HES dan Ibu Jurhatul Kulwah M. S. Y selaku sekretaris Prodi HES.
4. Bapak Drs. H. A. Jalaluddin, SH. MM selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin M. S. I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah
6. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Sahabatku Intan Elia, Puput Gayo, Atia Rahman.
9. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta keilmuan yang terkait dengan Muamalah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis,

Ayu Septiana
NPM.162103056

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Pajak dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Pajak Menurut Hukum Islam.....	15
b. Pendapat Ulama Tentang Pajak	18
c. Sistem Perpajakan dalam Islam	22
d. Hukum Pemungutan Pajak dalam Islam.....	27
e. Hubungan Zakat dan Pajak	29
f. Penetapan Zakat dalam Pengurangan Pajak	32
2. Pajak Penghasilan dalam Hukum Positif	
a. Pengertian Pajak Penghasilan	34
b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan PPh21	37
c. Dasar Hukum Pajak	38
d. Sistem Pemungutan Pajak	44
e. Penghasilan Tidak Kena Pajak	47
f. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21.....	48
3. Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i>	53
B. Tinjauan Pustaka	56

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang <i>Endorsement</i> di <i>Instagram</i>	
1. <i>Endorsement</i> di <i>Instagram</i>	59
2. Pengguna <i>Instagram</i>	61
3. Kegiatan dan Tujuan <i>Endorsement</i> di <i>Instagram</i>	65
4. Sistem Pembiayaan atas Upah <i>Endorsement</i>	69
B. Sistem Pengenaan Pungutan Pajak Penghasilan <i>Endorsemen</i>	
1. Peraturan Pengenaan Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i>	71
2. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i>	73
3. <i>Endorsement</i> Dalam Hukum Islam	75

BAB IV ANALISIS DATA

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i> Dalam Media Sosial <i>Instagram</i>	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan <i>Endorsement</i> Dalam Media Sosial <i>Instagram</i>	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	----

LAMPIRAN	93
-----------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan

1. Adapun Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam 38	26
2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2005 dan 2006	47
3. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015 dan Tahun 2016	48
4. Tarif pajak (Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008	49
5. Tarif pajak (Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008	63
6. Daftar Nama Selebgram.....	64
7. Daftar Nama Selebgram.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Endorsement* Dalam Media Sosial *Instagram*” untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka akan diuraikan secara singkat tentang istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.²

²Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 6.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia terhadap nash Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang terjadi setiap zaman.³

Hukum Positif adalah kumpulan asas-asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan mengikuti secara umum atau khusus.⁴

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.⁵

Endorsement atau *endorse* adalah suatu strategi pemasaran *online* yang efektif untuk meningkatkan penjualan yang dilakukan oleh selebgram melalui *instagram* dan selebgram mendapatkan *fee* atau bayaran.

Media Sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.⁶

Instagram adalah media sosial untuk berbagi kegiatan seseorang melalui video atau gambar yang di upload di *instagram*⁷

³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT.Penamadani, 2004), h. 6.

⁴R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003), h. 1.

⁵*Ibid.*

⁶Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi , Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

⁷"Selengram" (On-line), tersedia di : <https://www.ibigacademy.com/apa-itu-selebgram-asal-usul-endorse/> (3 september 2019).

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat di pahami bahwa skripsi ini adalah untuk membahas secara lebih mendalam dan kritis mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Endorsement* Pada Media Sosial *Instagram*, yang saat ini *endorse* merupakan salah satu pekerjaan atau aktivitas yang mendapatkan penghasilan yang cukup menggiurkan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan Penulis Memilih Judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Endorsement* Dalam Media Sosial *Instagram*”, sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif yang membuat tertarik untuk memilih dan membahas judul ini karena, mengingat bahwa perkembangan yang saat ini semakin modernisasi telah merubah zaman yang semakin maju dan terus berkembang, seperti mendapatkan penghasilan melalui media sosial yang dapat dikatakan sebagai pekerjaan dan atas penghasilan yang didapat maka akan terdapat pula kewajiban dalam membayar pajak penghasilan.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan pada skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari, dengan meneliti tentang pajak dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap pajak penghasilan *endorsement* yang akan menjadi suatu keilmuan bagi para pembaca serta para selebgram.

- b. Berdasarkan dari data Jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga dapat memungkinkan dapat di angkatnya judul ini sebagai judul skripsi dan karena tersedianya literatur yang menunjang penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memiliki aturan syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) dalam seluruh aspek kehidupan baik, dalam perekonomian, politik, budaya, teknologi dan lainnya. Hal ini memberikan petunjuk kepada setiap umat Muslim untuk dapat memahami setiap ajaran Islam secara benar terkait permasalahan ibadah dan *muamalah*.

Islam adalah agama yang hidup dan menghidupkan, agama yang meng-up *grade* (meningkatkan taraf hidup dari terbelakang atau tidak maju menuju taraf yang lebih maju dan modern) kehidupan dan menghidupkan manusia.⁸

Pajak adalah suatu aturan yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan bermuamlah, oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya atura-aturan syariat dalam perpajakan maka pajak akan dapat menjadi alat dalam penindas rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak haruslah di dasarkan dengan syariat, maka dengan perbuatan dalam pemungutan dan

⁸*Ibid.*, h. 9.

mendistribusikan pajak tentu akan bernilai sebagai ibadah bagi mereka wajib pajak maupun bagi para pemungut pajak.⁹

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-usyr* atau *al-maks*, atau disebut juga dengan *adh-dharibah* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak.¹⁰

Kata pajak dalam etimologi yang berasal dari bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang artinya suatu kewajiban penetapan dan membebankan atas tanggungnya.¹¹

Dalam dunia yang modernisasi banyak perubahan yang terjadi salah satunya dalam bermuamalah, seperti fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya jasa *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram untuk mempromosikan barang agar dapat meningkatkan penjualan. Banyaknya *online shop* menggunakan jasa *endorsement* tersebut, untuk dapat mempromosikan produk yang mereka jual agar penjualan meningkat.

Dengan demikian, kegiatan *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram mendapatkan penghasilan atas jasanya sesuai dengan kesepakatan di awal yang dilakukan antara pemilik *online shop* dengan selebgram, biasanya selebgram menerapkan tarif *endorsement* dengan sistem per- *post* misalkan 500 ribu untuk satu *post* di *instagram*.¹² Bahkan banyak selebgram-selebgram bisa mendapatkan penghasilan mencapai 8-30 juta dalam 1 bulan.

⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 28.

¹⁰Nahimunkar, *Pajak Dalam Islam*, tersedia di: <https://www.nahimunkar.org/pajak-dalam-islam-2/> (20 November 2019).

¹¹*Ibid*, h. 28.

¹²“Pajak” (*On-line*), tersedia di: <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-bisnis-endorsement/> (6 september 2019).

Dengan penghasilan yang besar maka dirjen pajak memutuskan untuk memungut pajak wajib pajak bagi para *selebgram*, karena hasil bayaran yang didapat oleh selebgram sama dengan hasil dari para pekerja seni atau artis lainnya atas pajak orang pribadi yang dikenakan wajib pajak. Oleh karena itu seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun aktivitas sebagai selebgaram akan dikenakan wajib pajak penghasilan PPh pasal 21, yang mana dalam hal ini status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹³

Dalam Islam pemungutan pajak sebenarnya tidak di perbolehkan dibebankan kepada kaum Muslimin dikarenakan kaum Muslim telah memiliki kewajiban yang dibebankan atasnya yaitu membayar zakat. Namun para ulama sepakat atas adanya kewajiban bagi kaum Muslimin untuk membayar pajak, untuk kepentingan negara yang sangat membutuhkan dana.

Dengan pendapatan negara yang tidak mampu mencukupi semua kebutuhan bagi negara, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat suatu kebijakan tentang adanya kewajiban dalam membayar pajak bagi warga negara yang sudah memiliki penghasilan untuk dapat melaksanakan kewajibanya membayar pajak guna mencukupi kebutuhan negara dalam kesejahteraan negara pada masyarakat. Karena pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan pertahanan suatu negara.

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2013), h. 212.

Ketentuan umum perpajakan dalam Islam salah satunya adalah pajak dipungut dari orang kaya atau mampu, yang mana dalam kontens ini seorang selebgram dapat dikatakan sebagai orang yang mampu atau kaya karena pendapatan mereka yang cukup besar dan telah mencapai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seperti dalam Al-Qur'an pada Surat QS. Al-Hasyr[59] ayat 7 yang berbunyi :

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah Swt kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah Swt, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt, amat keras hukumannya.” QS Al-Hasyr [59]: 7)¹⁴

Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, membayar pajak adalah wajib bagi mereka yang memiliki penghasilan sesuai kemampuan ekonomi yang dapat dikategorikan orang yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan diwajibkan membayar pajak untuk kebutuhan suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat. Pajak diperbolehkan, namun harus sesuai dengan syariat Islam.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 2002*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2002), h. 1275.

Para ulama memakai *dharibah* sebagai penyebutan harta yang dipungut sebagai kewajiban, yang merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.¹⁵

Dalam pemahaman Islam apapun yang dibayarkan sesuai dengan perintah Allah Swt adalah ibadah, jika itu bukan perintah, maka ia tidak termasuk ibadah. Dalam pemungutan pajak, jika dibuat sesuai dengan syariat maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan bernilai ibadah bagi pemungutnya maupun bagi wajib pajak sebagai jihad harta. Sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. dan akan mendapat balasan.¹⁶

Hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum pajak mengatur pula hubungan hukum antara negara dan orang orang atau badan badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumus menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat.¹⁷

Dengan penghasilan yang didapat atas jasa *endros* selebgram tersebut, maka selebgram akan dikenakan pajak penghasilan.

¹⁵Nahimunkar, *Ibid*.

¹⁶Gusfahmi, *Ibid*, h. 26.

¹⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h. 7.

Berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), segala suatu yang berkaitan dengan pemajakan PPh di atur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini adalah :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
2. Undang-undang No.7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-undang No.10 Tahun 1994 tentang tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 tahun 1991.
4. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
5. Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.¹⁸

Dari peraturan di atas, Undang-undang tentang pajak penghasilan (PPh) yang khusus pada pajak penghasilan terdapat pada PPh21, PPh 23, PPh 24 atas wajib pajak orang pribadi, subjek pajak yang berupa gaji,upah dan honorarium serta tunjangan atau dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak.¹⁹

Dalam Islam pungutan yang wajib dibayarkan berdasarkan perintah langsung dari Al-qur'an dan Hadis adalah zakat. Sedangkan kewajiban dalam membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung, dalam

¹⁸Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama,2010), h. 86.

¹⁹Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penhasilan*, (Yogyakarta: PT.CV.Andi,2010), h. 210.

konteks hanya mematuhi perintah penguasa, untuk dapat membayarkan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Dalam hal ini pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat serta pembangunan Negara.

Ulama berbeda pendapat tentang pemungutan pajak kepada kaum Muslimin atas harta mereka selain zakat, memungut pajak menurut para ulama memiliki 2 pendapat, yaitu diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya memungut pajak kepada kaum Muslim.²⁰

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam terhadap pemungutan pajak dan pengenaan pajak penghasilan *endrosement* dalam media sosial *instagram* dalam hukum Islam dan positif.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti untuk pengumpulan data sebagai sub-sub pembahasan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah untuk dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian ini.

E. Rumusan Masalah

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial di *Instagram*?
2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial di *Instagram*?

²⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 169-181.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak *endrosement* pada media sosial *instagram* dalam hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pajak Penghasilan *Endrosement* dalam Media Sosial di *Instagram*.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat dapat di klarifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk dapat memperkaya teori dalam pemahaman pada konsep perpajakan terutama pajak penghasilan yang kurang mendukung di kalangan para *selebgram*.
2. Secara Prakti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*)²¹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, membaca buku-buku, media massa dan literatur dan menelaah dari berbagai teori untuk mendapatkan data yang akurat serta sesuai dengan pembahasan materi penelitian, untuk

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Komulatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 56.

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²² Untuk mendapatkan data yang akurat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

2. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif yaitu melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya,²³ yang terkait dengan pajak dalam hukum Islam dan pajak dalam hukum positif.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu yang diperoleh berdasarkan informasi secara tidak langsung. Peneliti memperoleh data sekunder dari hasil bahan pustaka yang berupa data-data lapora, buku-buku, media sosial, *website* serta arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.²⁴

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa

²²M Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),h.11.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 197.

²⁴*Ibid.*

catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda lainnya.²⁵ Serta menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang harus dilakukan dengan membaca, mendengar serta mengamati, maupun penelusuran yang dapat dilakukan melalui media internet yang menjadi salah satu sumber utama dalam pengumpulan data.

4. **Prosedur Analisis Data**

Analisa Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data yang digunakan analisa kualitatif dan kesimpulan akhir menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisi yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang pajak *endrosement* pada sosial media di *instagram* yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan menilai tentang perpajakan dalam hukum Islam.

5. **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pegelolaan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu.

a. *Editing*

Pemeriksa data (*editing*) adalah memeriksa data pertanyaan yang telah di serahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari editing adalah mengurangi kesalahan pada daftar pertanyaan yang sudah dijelaskan sampai sejauh mungkin.²⁶

²⁵Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), h. 206.

²⁶Cholid Narbuko, Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015), h. 153.

b. *Organizing*

Organizing adalah mengatur data sumber dokumentasi sedemikian rupa agar dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁷

c. *Analizing*

Metode Analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode Analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara *Analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar dan semu, kemudian diteliti lebih lanjut yang akan lebih jelas data yang diperoleh dan hasilnya akan relevan, pada teknik ini peneliti akan menganalisa proses praktik penerapan pemungutan pajak *endrosement* ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif. untuk mengambil kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 154.

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), h. 300.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pajak Menurut Hukum Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-usyr* atau *al maks* dan *al-dharibah*, yang berarti pemungutan yang di tarik dari rakyat oleh penarik pajak.²⁹ Kata pajak dalam Al-Qur'an diterjemahkan sebagai *dharibah* yang mana secara etimologi berasal dari kata (*dharaba, yadhribu, dharban*) artinya adalah kewajiban, menentukan, menetapkan, membebaskan, dan lain-lain.³⁰

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memiliki banyak arti, namun para ulama mengartikan bahwa kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dapat di kategorikan *dharibah*.³¹

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal dengan istilah pajak (*tax*), yang bermakna sebagai pungutan wajib berupa uang yang harus di bayarkan oleh warga atau penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan atau penghasilan kita untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian,

²⁹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, (Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2007), h. 158.

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 815.

³¹Muhammad, *Ibid.*, h. 159.

dharibah dapat di artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.³²

Dalam ekonomi Islam tidak hanya membahas mengenai Bank atau sistem keuangan lainnya. Padahal dalam sistem ekonomi Islam terdapat pula konsep-konsep pandangan tentang perpajakan.

Definisi pajak menurut Para Ulama.³³

1) Abdul Qodim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal yang tidak ada uang atau harta.

2) Gazy inayah

Pajak adalah kewajiban dalam membayar tunai yang telah ditentukan oleh pemerintah yang sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan negara.

3) Imam Al-Gazali

Pajak adalah apa yang telah diwajibkan oleh setiap penguasa (pemerintah Muslim) kepada orang-orang yang mampu dengan menarik dari mereka

³²Gusfahmi, *Ibid.*, h. 29.

³³*Ibid.*

apa yang dipandang dapat mencukupi dalam kebutuhan negara untuk mensejahterakan rakyat ketika tidak ada kas didalam baitul mal.³⁴

4) Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, budaya dan tujuan negara lainnya.³⁵

Ditarik kesimpulan dari pengertian di atas adalah wajibnya membayar pajak bagi mereka yang memiliki kekayaan atau dalam kategori mampu untuk memenuhi kebutuhan negara dalam kesejahteraan bagi rakyat, sebagai kewajiban tambahan setelah zakat.

Sumber dana pembangunan yang merupakan salah satu sumber terbesar adalah pajak. salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat yang dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan manusia. Dilihat dari segi keadilan dan syariah masih terdapat kekurangsempurnaan, sehingga diperlukan model pengenaan pajak dan zakat di Indonesia yang tepat.³⁶

Pajak adalah kewajiban yang datang secara kontemporer, untuk kebutuhan suatu negara yang mendesak dan harus di paksakan dalam memungut pajak pemungutan pajak bagi kaum Muslim diwajibkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan pajak menurut syariat-syariat Islam.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Gustian Djuanda, et. Al. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 281.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti, yaitu hak milik penuh sang raja).

Oleh sebab itu, pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhi dua syarat:³⁷

- 1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- 2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

b. Pendapat Ulama Tentang Pajak

Pajak dalam pandangan para ulama memiliki perbedaan pendapat, yang menegaskan pemungutan pajak bagi kaum Muslimin. Beberapa ulama membolehkan adanya pemungutan pajak kepada kaum Muslim dan ulama yang mengharamkan pemungutan pajak kepada kaum Muslim.

- 1) Ulama yang mengharamkan pajak.

Pajak haram bagi mayoritas fuqaha, karena zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta dan tidak ada beban lainnya selain zakat,

³⁷Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar April, 2015), h. 35.

inilah pendapat dikalangan para ahli fiqh periode muta'akhirin. Hadis-hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang bersumber dari para sahabat Abu Hurairah ra, sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah An-Nissa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)³⁸

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling membutuhkan harta sesamamu dengan cara yang batil”. (QS. An-Nisa: (4) ayat 29).

Maksud dalam ayat ini adalah seorang muslim dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, batil dalam konteks perpajakan dikaitkan dengan memaksa pemilik harta untuk memberikan hartanya, konteks memaksa adalah batil karena tidak ada kerelaan pemilik harta memberikan hartanya.

Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ra.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ³⁹

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni”. (HR. Muslim).

³⁸Departemen Agama RI, *ibid*, h. 173.

³⁹Hadis HR. Muslim III/1321 No.1695, h. 113 Muslim.

Pada Zaman Umar ra.

“Seseorang telah menjual sebidang tanah. Umar lalu menasehatinya, “Simpanlah hasil penjualan itu dengan hari-hati di dalam lubang di bawah tanah di rumahmu”. Orang itu bertanya, “Tidakkah hal ini dianggap sebagai menimbun harta seperti yang diperingatkan oleh syariah?” Maka Umar berkata, “Jika zakatnya telah ditunaikan, maka tidak ada yang dkenai hukum kanz (menimbun harta)”.

Ayat tersebut menjelaskan, larangan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan Allah atau yang tidak dibenarkan Allah.⁴⁰

Dalam hadis-hadis di atas disebutkan bahwa, yang wajib ditunaikan atas harta adalah zakat saja. Inilah landasan, yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, untuk menyatakan bahwa kewajiban kaum Muslim atas hartanya adalah zakat.

2) Ulama yang memperbolehkan pajak

Ada sebagian kamu Muslim sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali dan lainnya dari kalangan tabi'in. Dalil-dalil yang mereka kemukakan, antara lain:⁴¹

Al-Qur'an Surah Al-An'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَسَايًا وَغَيْرَ مُمْتَسَايَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1992), h. 342.

⁴¹Gusfahmi, *Ibid*,. h. 175.

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-An’am (6): 141).⁴²

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, tatkala ditanyakan “apakah hak yang diwajibkan pada ayat tersebut (Q.S Al-An’am (6): 141)?” Beliau menjawab, Ya! Itulah kewajiban di luar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya di waktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi.⁴³

Ibnu Hazam mengatakan:

“Apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggung jawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Inilah pendapat yang tidak bisa diragukan, yang diambil dari makna dan tujuan Al-Qur’an”.

Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*

“Jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya”.

Diperbolehkannya memungut pajak, menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana

⁴²Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.129

⁴³Gusfahmi, *Ibid.*, h. 175.

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban.⁴⁴

Sebagaimana sebagaimana kaidah fiqh mengatakan:

مالا يتم اجب إلا به فهو واجب⁴⁵

“segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus denganya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.

Pajak yang dihimpun oleh pemerintah harus dipergunakan untuk kepentingan yang diizinkan Allah Swt, yakni kemaslahatan segenap rakyat.⁴⁶ Pemungutan yang dilakukan atas kepentingan masyarakat tetap harus berpatokan dengan syariat Islam, terutama dalam keadilan dalam pemungutan pajak serta tidak ada penindasan yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak.

c. Sistem Perpajakan dalam Islam

Perpajakan dalam Islam sudah ada sejak masa pemerintahan Rasulullah Saw sampai dengan masa pemerintahan Khulafaur Raysidin, yang mana dalam masa pemerintahannya pada zaman itu menggunakan prinsip anggaran berimbang (*balance budget*).

Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal priode Islam adalah penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena

⁴⁴Nasruddin, Dewani Romli, “Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Adalah* , Vol. X, No. 1 (Januari 2011), h. 88. (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241> (04 Desember 2019).

⁴⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96

⁴⁶Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 90.

perang atau bencana lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan.⁴⁷

Dalam pandangan Islam, fokus utama dalam pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan dalam pembangunan adalah tercukupya segala kebutuhan manusia dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya.

Keuangan negara berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ia berisi manajemen pajak dan penerimaan lain yang efisien, penganggaran yang benar dan kontrol yang efektif terhadap pengeluaran negara.

Sumber-sumber penerimaan harta publik dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup tentang zakat, *usyr*, *khums*, *fai*, *jizyah* dan *kharaj*. Sumber dalam pemasukan negara tersebut diadakan dan di gunakan oleh negara untuk dapat membiayai berbagai pengeluaran penting dan untuk membuka pintu distribusi kekayaan antara golongan masyarakat miskin dan masyarakat kaya.⁴⁸

Ghanimah, *fai*, *kharaj* dan *usyr* merupakan harta yang diperoleh dari pungutan yang bersumber dari orang-orang kafir. Dalam pendapatan negara dalam bentuk *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* merupakan *fai* dalam bentuk pungutan atas pemanfaatan tanah orang kafir. Pungutan ini memiliki takaran tertentu

⁴⁷Fitri Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam", *Jurnal Investasi*, Vol. 5 No.1 (Juni 2009), h. 22.

⁴⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2012), h. 253.

baik dalam yang telah ditentukan oleh syara, maupun berdasarkan ijtihad khalifah.⁴⁹Jenis-jenis pajak dalam Islam sebagai berikut:

1) *Dharibah*

Zakat adalah pungutan wajib maupun tidak wajib atas harta tertentu kaum Muslim yang telah memenuhi jumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sementara *dharibah* merupakan pungutan (pajak) yang diwajibkan Allah Swt atas kaum Muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

2) *Kharaj*

Kharaj adalah penerimaan pajak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi Islam, istilah *kharaj* berarti pajak atas tanah dimana para pengelola wilayah takluk harus membayarnya kepada negara Islam.

Sanksi penarikan *kharaj* juga dijumpai dalam praktik Nabi yang memberikan tanah taklukan Kahibah kepada orang Yahudi (yang semula adalah pemilik tanah tersebut) dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar setengah dari hasil pertanian itu kepada negara.

3) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan oleh negara Islam atas warganya yang non-muslim (*ahl-dzimmah*) yang ada di negara Islam. Pajak ini disebut dengan upeti atau *poll-tax*. *Jizyah* dipungut berdasarkan ketetapan Al-Qur'an pada surat At-Taubah [9] ayat 29.⁵⁰

⁴⁹Ahmad Djalaluddin, at. Al. *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 306.

⁵⁰Muhammad Sharif Chaudhry, *Ibid.*, h. 262.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yang diberi Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(At-Taubah [9] ayat 29).⁵¹

Aturan-aturan yang berhubungan dengan *jizyah* berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik para khalafaur rasyidin adalah *jizyah* dikenakan kepada seluruh komunika non-Muslim apa pun agamanya. Nabi SAW menetapkan tarif *jizyah* sebesar dinar atau 12 dirham per orang per tahun, dan pemungutan *jizyah* tidak boleh ada kekerasan ataupun penidasan. Hasil dari pemungutan *jizyah* dikumpulkan di baytul al-mal dan kemudian disalurkan kepada sektor publik tanpa ada proses pengendapan dana dalam kurun waktu lama.

4) *Usyr*

Dikalangan ahli fiqh, *usyr* memiliki arti sepersepuluh yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.⁵¹ Aturan dan regulasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi berikut adalah pegangan dalam persoalan dalam pungutan *usyr*.

⁵¹Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), h. 518.

- a) *Usyr* dipungut atas produk pertanian dari tanah *usyr*.
- b) Menurut Hadis dan Sunnah Nabi, tarif *usyr* adalah sepersepuluh atau 10% dan dihitung sebelum dikurangi dengan segala biaya produksi.
- c) Jumlah minimal produk pertanian yang kena *usyr* adalah lima waqas atau 948 kg.

Table I
Adapun Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam⁵²

No	Nama	subjek	Objek	Tarif	Tujuan
1.	Zakat	Muslim	Harta.	Tertentu.	Umum
2.	Usyr	Muslim	Hasil Pertanian	Tetap, 10%	Umum
3.	Khums	Muslim	Rampasan perang.	Seperlima dari <i>ghanimah</i>	Umum
4.	Jizyah	Non-Muslim	Jiwa.	Tetap, 12 dirham.	Umum
5.	Fai	Muslim	Rampasan perang	Seluruh yang ditinggalkan kaum kafir	Umum
6.	Kharaj	Muslim	Hasil tanah.	Tarif tetap	Umum
7.	Ghanimah	Muslim		Rampasan perang	Fakir, pasukan perang

Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan umum perpajakan dalam Islam:

- a) Pajak diwajibkan dipungut kepada semua orang.
- b) Pajak hanya diwajibkan untuk kaum Muslim.
- c) Pajak dipungut sesuai dengan kebutuhan negara.

⁵²*Ibid.*

d. Hukum Pemungutan Pajak Dalam Islam

Hukum dalam pungutan pajak sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang oleh agama Islam, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah karena untuk kepentingan negara yang sangat membutuhkan pemasukan dari pajak. pungutan yang dilakukan pun tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan karena harus sesuai dengan syariat.

Pungutan ini hal yang baik dan sangat penting, tanpa adanya pajak maka akan banyak kekurangan yang terjadi di Indonesia, karen pajak adalah sektor terpenting dalam kesejahteraan masyarakat.⁵³

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka untuk menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum Muslim. Namun kewajiban *dharibah* tersebut hanya di bebaskan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan perlengkapan dengan cara *makruf*.⁵⁴

Dharibah diutamakan diperuntukan sebagai:

- 1) Pembiayaan jihad dan segala hal yang dipenuhi terkait dengan jihad.
- 2) Pembiayaan para Fuqaha, orang miskin, Ibnu Sabil.
- 3) Pembiayaan yang dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemamfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak di biyai maka akan bahaya menimpah umat.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam cet 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 500.

4) Pembiayaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam dan mengusir musuh.⁵⁵

Pajak diwajibkan kepada semua orang yang sesuai dengan ketentuan wajib setor pajak. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, presentasi, harga dan ketentuan.

Dengan adanya syarat yang ditetapkan, maka pajak penghasilan tetap boleh di pungut, karena sudah memenuhi syarat pembolehan sebuah pendapatan negara. Dana pajak (*dharibah*) harus hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan memang kewajiban kaum muslim, tidak dipergunakan untuk kegiatanyang subhat, apalagi yang haram.⁵⁶

Pajak terbagi menjadi dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagai ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “*al-wazha-if*” atau “*al-kharraj*” dan dikalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “*an-nawaib*”, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sultan, sedangkan dikalangan ulama Hanabila dinamakan dengan “*al-kalf as-sulthaniyah*”, yaitu pajak yang diambil secara adil dan memenuhi syaratnya dan pajak yang diambil secara *zhalim* dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa Muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk dapat mencegah kerugian yang menimpah, sedangkan kebendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Dwiarso Utomo, et. al. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2011), h. 15.

e. Hubungan Zakat dan Pajak

Hubungan antara zakat dan pajak adalah dua hal yang berkaitan dengan kaum Muslim, dimana kedua pemungutan tersebut adalah suatu kewajiban yang harus di paksakan kepada kaum Muslim yang memiliki penghasilan.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁷

Sedekah yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, Islam mengatur besaran zakat, jenis zakat dan peruntukan zakat.⁵⁸

Persamaan dan Perbedaan antara pajak dan zakat

Pajak dan zakat adalah dua hal yang memiliki persamaan, selain pemungutan yang dipaksakan, persamaan lainnya adalah:⁵⁹

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak dan juga mendapatkan zakat. Bila seorang terlambat membayar zakat atau pajak maka penguasa yang diwakili akan memaksanya.
- 2) Pajak dan zakat disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah.⁶⁰

⁵⁷Syaikh Abu Bakar Zabir al-Jaza Iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Muslim*, (Jakarta : PT. Darul Haq), h. 499.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pt. Pustaka Mizan, 1999), h. 999.

⁶⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 52.

- 3) Dari sisi tujuan, zakat dan pajak memiliki persamaan dimana, keduanya memiliki tujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Ketentuan pajak yang tidak memiliki adanya imbalan tertentu, karena para wajib pajak membayar pajak karena merupakan aturan pemerintah selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dengan zakat, zakat tidak memperoleh suatu imbalan, ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya.⁶¹

Dibalik persamaan antara pajak dan zakat tersebut, pada prinsipnya mengandung beberapa aspek perbedaannya antara keduanya yaitu:⁶²

- 1) Zakat hanya diwajibkan bagi umat Muslim saja, sedangkan pajak diwajibkan untuk seluruh penduduk suatu negara tanpa memandang agama.
- 2) Dasar hukum pelaksanaan keduanya, zakat merupakan aturan syar'i yang bersifat *qath'i* (pasti) karena dasar pelaksanaannya ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang wajib ditunaikan dan dilaksanakan oleh kaum Muslim, dan pajak di atur oleh Undang-undang pajak yang berlaku di suatu negara.
- 3) Zakat disalurkan secara langsung kepada yang berhak dan tidak boleh ditahan terlalu lama sedangkan, pajak pemanfaatanya secara tidak langsung.

⁶¹Yusuf Qardawi, *Ibid.*, h. 999-1000.

⁶²*Ibid*

- 4) Tarif zakat ditetapkan dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah sedangkan, tarif pajak disesuaikan dan diubah sesuai dengan situasi yang ada.
- 5) Zakat harta diwajibkan atas harta yang memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, tidak punya hutang dan harus mencapai nisab tertentu bagi sebagian zakat, sedang pajak diambil dengan memperhitungkan syarat-syarat tersebut, terkadang pajak ditarik dari orang miskin yang berada dibawah batas kecukupan dan sama aja apakah dia punya hutang atau tidak.⁶³

Kewajiban membayar zakat dan pajak merupakan suatu keharus bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan dapat diketahui hukumnya secara pasti. Namun permasalahan yang muncul adalah, seseorang yang dibebani keduanya (wajib pajak dan zakat) pada waktu yang bersamaan. Apakah cukup membayar zakat saja dan tidak membayar pajak atau sebaliknya.⁶⁴

Menurut pendapat ulama, Rasyid Rida mengatakan bahwa orang yang mempunyai kewajiban keduanya (zakat dan pajak) secara bersamaan waktunya maka dengan hanya membayar zakat tidak dapat menggugurkan kewajiban dalam membayar pajak, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain keduanya adalah wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan masing-masing.⁶⁵

⁶³Yusuf Qardawi, *Ibid.*

⁶⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 222.

⁶⁵Yusuf Qardawi, *Ibid.*

f. Penetapan Zakat dalam Pengurangan Pajak

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim dan wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan wajib pajak untuk kepentingan negara yang bersifat memaksa. Selama ini masyarakat khususnya umat Islam harus membayar keduanya pajak dan zakat sehingga memiliki kewajiban ganda yang sangat membebankan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya Pemerintah menetapkan kebijakan yang menjadi solusi kewajiban ganda antara pajak dan zakat dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 22 dan 23 ayat 1-2. Aturan tersebut berbunyi:⁶⁶.

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak”

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, aturan tersebut berbunyi:⁶⁷

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penerapan zakat atas pengurang pajak diatur dalam peraturan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak

⁶⁶Ahmas Yani, *Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 88.

⁶⁷Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/lembaga.

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:⁶⁸

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Teknis Dalam Perhitungan Zakat dalam Pengurangan Pajak dihitung dengan biaya pengurangan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan dan menghasilkan total Penghasilan Kena Pajak (PKP).⁶⁹

Penghitungan Tanpa Pajak:

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Netto} - \text{TPKP}$$

Penghitungan Dengan Zakat:

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Netto} - \text{Zakat} - \text{PTKP}$$

Sementara Penghasilan Netto diperoleh dari:

⁶⁸ Ahmas Yani, *ibid*, h. 93.

⁶⁹ Ayusm, “Zakat Sebagai Pengurangan Zakat” (On-line), tersedia di: <https://ydsf.org/berita/zakat-sebagai-pengurang-pajak-ydsf-9DbZ.html> (11 Juni 2020).

Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – Pengurangan (biaya) yang dikeluarkan oleh UU PPh.

2. Pajak Penghasilan Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak berasal dari kata bahasa jawa yaitu “*ajeg*” yang artinya sebagai pemungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur berubah nama menjadi *pa-ajeg* yang memiliki arti sebagai pemungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap penghasilan dan hasil bumi yang di peroleh oleh wajib pajak.⁷⁰

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan Undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, dapat dipaksakan, yang berfungsi sebagai dana untuk penyaluran negara dan sisanya, dipergunakan untuk pembangunan serta sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁷¹ Pajak semulanya hanyalah pemberian sukarela dan berubah menjadi pungutan yang wajib, dan hal tersebut adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar untuk kepentingan negara.⁷²

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

⁷⁰Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 21.

⁷¹Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1.

⁷²Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 1997), h. 3.

- 2) Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Penerimaan dari sector pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran-pengeluaranpemerintah.⁷³

Definisi atau pengertian pajak menurut para ahli pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Ray M. Sommer, adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.⁷⁴
- 2) Menurut Prof. Dr. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi dan langsung ditujuk sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara untuk menyetorkan iuran yang wajib dikeluarkan sesuai dengan peraturan Undang-undang negara yang

⁷³Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004), h. 1.

⁷⁴*Ibid.*

dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan untuk negara yang berguna untuk kepentingan kesejahteraan umum.

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan, yang telah berubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.⁷⁵ Pengertian pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan pasal 4 Ayat (1).

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.⁷⁶

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 menyebutkan “PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.⁷⁷

⁷⁵Casavera, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 2008*, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009), h. 125.

⁷⁶Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (1).

⁷⁷Billy Ivan Tansuria, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010), h. 1.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenal karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan PPh21

1) Subjek Pajak Penghasilan PPh21

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2008 subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar negeri.
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi maksudnya merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu, ahli waris.
- c) Badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pensiun, dan bentuk badan lainnya.
- d) Bentuk usaha tetap, yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari

⁷⁸Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 99.

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha di Indonesia.⁷⁹

Subjek pajak di bagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objektifnya.⁸⁰

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.⁸¹

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a) Pejabat negeri, adalah mereka yang bekerja sebagai pejabat negara seperti presiden, wakil presiden serta bawahanya.
- b) Pegawai Negeri Sipil, adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974.
- c) Tenaga lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang tersebut bekerja.

⁷⁹Roristua Pangdiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Graha Ilmu ,2015), h. 66.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2010), h. 215.

- d) Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja dalam jabatan negeri atau BMUN atau BUMD.
- e) Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.⁸²
- f) Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.
- g) Penerima honorium, adalah orang pribadi yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- h) Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.⁸³

2) Objek Pajak Penghasilan PPh21

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.⁸⁴

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

⁸²Mardiamso, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), h. 158.

⁸³*Ibid*, h.159.

⁸⁴*Ibid*.

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah, honorium (termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, imbalan sejenis lainnya.
- c) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.⁸⁵
- d) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
- e) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.⁸⁶

c. Dasar Hukum Pajak

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, dan mendapat hukuman jika melanggarnya.⁸⁷

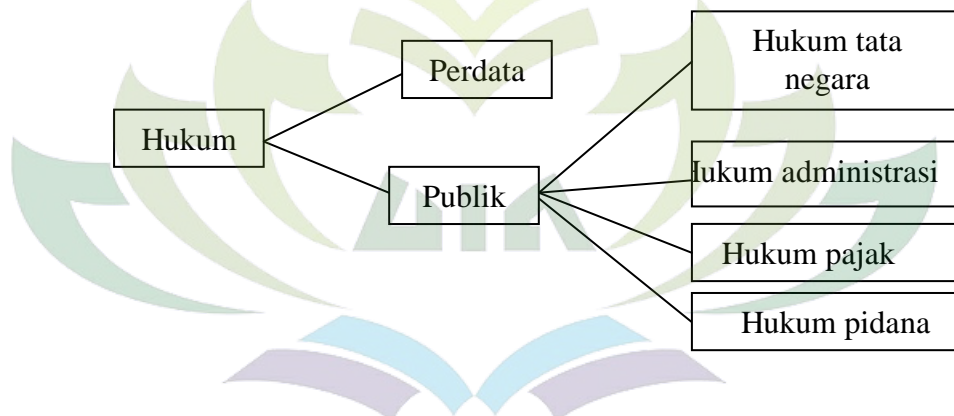
⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ S Munawir, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), h. 102.

⁸⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1986), h. 38.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.⁸⁸

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum lainnya, yang dapat di gambarkan sebagai berikut :⁸⁹



Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak menganut paham imperatif, yakni berarti pelaksanaannya tidak dapat di tunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut di terima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu harus membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

⁸⁸Ahmad Jalaluddin, *Pajak Penghasilan*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 2

⁸⁹S Munawir, *Ibid.* h. 120

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang yang berkewajiban membayarnya.⁹⁰

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal.

1) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.⁹¹

2) Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak .

Sanksi Perpajakan di Indonesia

⁹⁰Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31-33.

⁹¹*Ibid.*

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, yang sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁹² Sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi, perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan:
 - a) Pengenaan bunga, sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) dan 2(b) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.⁹³
 - b) Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besaran nya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

⁹²Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2008), h. 25

⁹³*Ibid.*

2. Sanksi Pidana, sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Hak-hak yang dimiliki wajib pajak adalah.⁹⁴

- a) Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi membebaskan ketetapan pajak dalam hal: terdapat kesulitan tulis, kesalahan hitungan tarif ataupun terdapat kesalahan menentukan dasar penetapan pajak.
- b) Mengajukan keberatan kepada Inspeksi Pajak atau Direktur Jendral Pajak apabila wajib pajak keberatan terhadap ketetapan pajak.
- c) Meminta pengembalian pajak, meminta pemindah bukuan setoran pajak ke setoran pajak lainnya atau setoran berikutnya.
- d) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana kepada pengadilan negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum atau pembocoran rahasia dari wajib pajak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada wajib pajak.

⁹⁴Dina Latifah, Kumpas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apa saja, (On-Line), Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak> (23 oktober 2019).

d. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga dapat mencapai tujuan dalam pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya.⁹⁵ Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.⁹⁶
- b) *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan Fiskus.⁹⁷
- c) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

⁹⁵Rimsky K Judisseno, *Perpajakam Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 12.

⁹⁶Mardiasmo, *Perpajakam Edisi Revisi 2006*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset), h. 7.

⁹⁷Rimsky K Judisseno, *ibid*, h. 14.

d) *With Holding System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili yaitu Pemungutan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) dalam suatu negara.

b) Asas sumber yaitu Pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorial tanpa memperhatikan tempat tinggalnya.⁹⁸

c) Asas kebangsaan yaitu asas pemungutan pajak ini berdasarkan status kewarganegaraan seseorang yang terbeban pajak atasnya, dengan penghubungan kebangsaan dari suatu negara.

3) Stelsel Pajak

a) Stelsel nyata (*riel stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu objek (penghasilan yang nyata), yang diperoleh setiap tahunnya sehingga pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.⁹⁹

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-undang.

⁹⁸*Ibid.*, h. 13.

⁹⁹Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 6.

- c) Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, pada awal tahun dengan penghitungan besaran pajak berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah faktor pengurangan pada penghasilan wajib pajak atau keringanan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang disesuaikan dengan keadaan pribadi wajib pajak yang bersangkutan (keluarga dan tanggungan).¹⁰⁰

Besarnya PTKP sudah mengalami beberapa perubahan, yang berlaku mulai tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Table.II
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2005 dan 2006

	Besaran PTKP untuk Tahun Pajak (Rp)		
	Sebelum 2005	2005	Mulai 2006
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan wajib pajak kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000
Tambahan istri bekerja	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan tanggungan	1.440.000	1.200.000	1.200.000

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor. 122/PMK.010/2015 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

¹⁰⁰ Ahmad Jalaluddin, *Pajak Penghasilan*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 45.

Table.III
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015 dan Tahun 2016

Uraian	Status	PTKP 2015	PTKP 2016
Wajib Pajak	TK0	36.000.000	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK 1	39.000.000	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK 2	42.000.000	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK 3	45.000.000	67.500.000
Wajib pajak kawin	K0	39.000.000	58.000.000
+ Tanggungan 1	K 1	42.000.000	63.000.000
+ Tanggungan 2	K 2	45.000.000	67.500.000
+ Tanggungan 3	K 3	48.000.000	72.000.000
Wajib pajak kawin (istri)	K/i/0	75.000.000	112.500.000
+ Tanggungan 1	K i/1	78.000.000	117.000.000
+ Tanggungan 2	K i/2	81.000.000	121.500.000
+ Tanggungan 3	K i/3	84.000.000	126.000.000

f. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.¹⁰¹

Tarif pajak yang dikenakan atas pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak dalam negeri, tarif pajak penghasilan diterapkan terhadap seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun.¹⁰²

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghitungan dan pengenaan pajak dilakukan menurut sifat dan sumber dari suatu penghasilan serta siapa wajib pajak yang menerima penghasilan tersebut.

Macam-macam tarif pajak

¹⁰¹Dr. Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2011), h. 11.

¹⁰²*Ibid.*

- 1) Tarif sebanding/proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.¹⁰³

Table IV
Tarif pajak (Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008)

Dasar pengenaan pajak	Tarif PPN	Jumlah Pajak
10.000.000	10%	1.000.000,-
20.000.000	10%	2.000.000,-
40.000.000	10%	4.000.000,-
80.000.000	10%	8.000.000,-

- 2) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

Contoh: Tarif Bea Materai Rp 6.000,00,-

- 3) Tarif progresif adalah presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Table V
Tarif pajak (Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008)¹⁰⁴

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Mulai 1 januari 2009, sesuai dengan Pasal 21 ayat (5a) UU PPh 2008, wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normal yang berlaku.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, h. 18.

¹⁰⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), h. 9.

¹⁰⁵ Chairi Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 80.

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lainnya yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak di haruskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tarif pajak yang berlaku serta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

1) Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

- a) Pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Neto (PN) dihitung seluruh Penghasilan Bruto (PB) dikurang dengan biaya jabatan.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{PN} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh} = \text{PB} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}.$$

- b) Penerima pensiun berkala yang dibayar secara bulanan, besar penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurang dengan biaya pensiun.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{PN} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh} = (\text{PB} - \text{biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{TARIF Pasal 17 UU PPh}^{107}$$

- c) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang di bayar secara bulanan, bagi pegawai tidak tetap yang penghasilanya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama (satu)

¹⁰⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2009), h. 170.

¹⁰⁷*Ibid*, h. 171.

bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00 besar penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

PPh Pasal 21 = (PB – PTKP) X tarif Pasal 17 UU PPh.

2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan pada penghasilan bruto, sebagai berikut:

- a) Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp150.000,00.
- b) Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan.

3) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- a) Penghasilan kena pajak sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan bahwa yang bersangkutan memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lain.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{PB} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh.}^{108}$$

- b) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, dokter, notaris dan aktuaris.¹⁰⁹
- c) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- d) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- e) Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan .

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{PB} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh.}$$

- 4) Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:
 - a) Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - b) Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan dari pekerja bebas adalah 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang di bayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Artis, dokter, pemain musik, iklan dan yang lainnya), dengan besar perkiraan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorium atau imbalan lainnya.¹¹⁰

3. Pajak Penghasilan Pada *Selebgram*

Seiring dengan perubahan zaman banyak hal yang mengalami perubahan dan perkembangan salah satunya teknologi yang menciptakan banyak inovasi, seperti perubahan yang semakin canggih secara tidak langsung mempengaruhi sistem perdagangan, transaksi, sosial, dan pekerjaan melalui media sosial.

Media sosial menurut Tjiptono adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitasi percakapan.¹¹¹ Yang menjadi wadah tempat para *influencer* bekerja, *influencer* adalah seseorang yang memiliki *followers* atau pengikut yang banyak di media sosial dan mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikut mereka. Contohnya seperti seorang *selebritis*, selebgram, blogger, youtubers dan yang lainnya.¹¹² Pekerjaan yang dilakukan banyak orang seperti *influencer* di media sosial adalah jasa *endorsement* yang dilakukan oleh seorang selebgram untuk dapat melakukan suatu kegiatan dan mendapatkan penghasilan.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 143.

¹¹¹Tjiptono Fandy, *Pemasaran Esensi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 1.

¹¹²“Influencer” (On-line), tersedia di: <https://kumparan.com/sociabuzz-influencer-marketing-platform/apa-itu-influencer-marketing> (12 Maret 2020).

Kegiatan yang dilakukan selebgram di media sosial *instagram* adalah mempromosikan suatu barang melalui media gambar atau video yang di *upload* di *instagram* dan mendapatkan penghasilan yang besar atas jasa tersebut. Dengan penghasilan yang didapatkan selebgram maka pemerintah Indonesia memutuskan bahwa untuk semua profesi sebagai *influencer* seperti selebgram dan youtubers yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP berkewajiban melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya atas jasa *endorsement* yang di lakukannya.¹¹³

Adapun sejauh ini belum ada ketentuan khusus mengenai pajak *endorsement* atau selebgram, namun pajak yang di tarik atas mereka adalah pajak yang bersifat umum. Kegiatan atau aktivitas yang di lakukan oleh selebgram dapat dikatakan sebagai salah satu Pajak Penghasilan (PPh) atas fee atau bayaran yang diterima Selebgram hampir sama dengan pajak atas para pekerja seni atau artis lainnya.¹¹⁴

Dasar pengenalan pajak atas youtubers atau selebgram diatur dalam PPh21 dan PPh23, dimana kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa PPh21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, kegiatan apapun yang dilakukan oleh orang pribadi.

¹¹³Yorika Vanbora, "Youtubers dan Selebgram Sebagai Wajib Pajak di Era Modern" (Online), tersedia di: <https://www.pajakku.com/read/5dc3f8b5387af773a9e01115/Youtuber-&-Selebgram-sebagai-Wajib-Pajak-di-Era-Modern> (15 Februari 2020).

¹¹⁴Anang Purnadi, Selebgram Sudah Seharusnya Bayar Pajak, (Pegawai Direktorat Jendral Pajak), On-Line, tersedia di: <https://pajak.go.id/artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak> (06 Desember 2019).

Mengenai pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak atas penghasilan dari kegiatan *endorsement* di media sosial *instagram*, terdapat aturan yang dijadikan hukum yang wajib untuk di taati oleh setiap selebgram. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem *e-commerce* atau sistem elektronik. Jadi, permenkeu 210/PMK.010/2008 merupakan aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pemungutan pajak baik itu (PPN, PPnBM, dan PPh) dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan kata lain, permenkeu 210/PMK.010/2008 mengatur pemungutan PPh dari kegiatan penjualan online, *youtube*, *selebgram*, *reseller*, *endorsementm* ojek online melalui sistem elektronik tersebut.¹¹⁵

¹¹⁵Dimas Hutomo, "Pengenalan Pajak Bagi YouTuber, Selebgram, dan Penjual Olshop di Medsos" (On-Line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/02 Juli 2020>).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang disebut selebgram dan *Youtuber* adalah mereka yang melakukan kreativitas, dan atas penghasilan yang mereka dapatkan jika pendapatan di bawah Rp.54 Juta itu tidak termasuk dalam pendapatan kena pajak. Namun, jika pendapatan yang didapatkan melebihi di atas PTKP, maka harus kena pajak.¹¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, siapapun yang menerima penghasilan atas pekerjaan atau kegiatan apapun yang diperolehnya dan penghasilan tersebut telah mencapai PTKP dengan ketentuan yang berlaku maka akan disebut sebagai wajib pajak atas penghasilannya, dan harus melaporkan penghasilannya tersebut kepada pihak perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.03/2018 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, maka norma ini adalah norma yang paling direkomendasikan. Pekerja seni atau kegiatan hiburan dan aktivitas lainnya (golongan dari *youtubers* dan selebgram) maka mendapatkan tarif normal sebesar 35%- 50% dan kegiatan pekerja seni, besar norma yang dikenakan sebesar 50%.

Pemasukan dari kegiatan selebgram yaitu *endorsement* yang mereka lakukan, tidak dapat ditentukan penghasilannya dengan pasti, namun selebgram yang beraktivitas sebagai *endorsement* akan dikenakan wajib pajak jika penghasilan yang mereka dapatkan telah mencapai lebih dari PTKP, atau jika dalam 1 tahun penghasilan selebgram bisa mencapai perkiraan sampai

¹¹⁶Andina Librianty, "Soal Pajak Selebgram Ini Kata Sri Mulyani" (On-line), tersedia di: <https://www.liputan6.com/tekno/read/3875379/soal-pajak-selebgram-ini-kata-sri-mulyani>, (14februari 2020).

Rp.55juta. Untuk perhitungan besaran pajak yang digunakan adalah sama dengan pajak yang diterapkan pada profesi lain.

Atas penghasilan yang diterima oleh selebgram dalam aktivitas *endorsement* maka wajib untuk membayar pajak dan melaporkan penghasilannya kepada pihak pajak.

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pajak penghasilan endrosemen ataupun pajak dari kegiatan yang dilakukan di media sosial. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang pajak endrosement atau pajak dari media sosial.

1. Skripsi dari Anggia Yustika Sari dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* Studi Kasus di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Jakarta”.¹¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan pajak atas kegiatan transaksi *E-commerce* seperti shopee, lazada, untuk membahas tentang pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, tentang adanya biaya pajak . Terdapat perbedaan, pada penelitian Anggia Yustika yang meneliti dan membahas tentang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan penulis meneliti

¹¹⁷ Anggia Yustika Sari, “ *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Studi Kasus di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Jakarta*”, (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), h. 30.

tentang pajak penghasilan dari kegiatan *endorsement* yang dilakukan di media sosial *instagram*.

2. Melisa Rahmaini Lubis, dengan judul skripsi “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce*”.¹¹⁸ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan, adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang adanya kebijakan pengaturan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi *E-commerce* serta faktor yang menghambat pemungutan pajak penghasilan dari transaksi *E-commerce*, sedangkan penulis meneliti tentang hukum pajak penghasilan *endorsement* dalam hukum Islam serta pemungutan yang dilakukan dalam perpajakan.
3. Nur Intan Septiani dengan judul “Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan Studi Kasus di *Media Sosial Instagram*”.¹¹⁹ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan, skripsi ini mengkaji tentang kepatuhan selebgram untuk dapat membayar pajak atas penghasilan yang didapatkan sesuai dengan PPh21 serta faktor utama yang menyebabkan hambatan tidak membayar pajak selebgram, sedangkan peneliti membahas mengenai pajak dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif atas penghasilan selebgram di media sosial *instagram* serta pemungutan pajak selebgram.

¹¹⁸Melisa Rahmaini Lubis, “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce*”, (Skripsi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017).

¹¹⁹Nur Intan Septiani, “Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan Studi Kasus di *Media Sosial Instagram*”,(Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013.
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penhasilan*, Yogyakarta: PT. CV. Andi, 2010.
- Warson, Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Djalaluddin, Ahmad, at. Al. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ivan, Tansuria Billy, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010.
- Casavera, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 2008*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009.
- Anwar, Pohan Chairi, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 2002*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Utomo, Dwiarto et. al. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.
- Djuanda, Gustian, et. Al. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Narbuko, Cholid, Achamdi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Alwi, Hasan, Sugono Dendi, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Purwono, Herry, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.

Syahatah, Husayn, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004.

Mardiasmo, *perpajakan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.

-----*.Perpajakam Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2006.

-----*. Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008.

-----*. Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2009.

-----*. Perpajakan Edisi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Pahala, Siahaan Marihot, *Hukum Pajak Elementer,Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2010.

Farid, Mas'udi Masdar, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Munawir, *Akuntan Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: PT. Liberty Yogyakarta, 1985.

-----*. Perpajaka*, Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta,1997.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2007.

Sharif, Chaudhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2012.

Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011.

Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam cet 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Santoso, Brotodihardjo R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.

Nasrullah, Rulli, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi , Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.

Munawir S, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2003.

Husin, Al-Munawar Said Agil, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, Jakarta: PT.Penamadani, 2004.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 1992.
- Kurnia, Rahayu Siti, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Judisseno, Rimsky, *Perpajakam Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Pangdiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimin, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisni, Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Salbino, Sherief, *Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula*, Jakarta, 2014.
- Abu Bakar Zabir al-Jaza Iri Syaikh, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Muslim*, Jakarta : PT. Darul Haq.
- Fandy, Tjiptono, *Pemasaran Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pt. Pustaka Mizan, 1999.
- , *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat 1.

Jurnal

- Yustika Sari Anggia, “*Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Studi Kasus di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Jakarta*”, (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Faradhita Delicia Savira, “Analisis Pengaruh Endorsement dan Views Terhadap Kredibilitas Youtubers”. (Makalah Program Manajemen Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017.
- Fitri Kurniawati, Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam, *Jurnal Investasi*, Vol. 5 No.1, Juni 2009.

Rizky Wiradini, "Presentasi Kelas Sosial Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang Melalui Instagram" . *Jurnal Perspektif* Vol. 2 No. 2. Tahun 2019.

Miming Lestari, "*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar April, 2015.

Nasruddin, Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia, *dalam Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 1, Januari 2011.

Nur Intan Septiani, "*Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPH) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan Studi Kasus di Media Sosial Instagram*", (Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018

Wawancara

Pia Damayanti, wawancara dengan selebgram lampung, Lampung, 18 Desember 2019.

Yon Arsal, Wawancara Dengan direktorat potensi kepatuhan dan penerimaan pajak, Youtube Ortax, Jakarta, 11 November 2016.

Hestu Yoga Saksama, Wawancara Dengan Humas Dirjen Pajak Kemenkeu Youtube Metrotv, Jakarta, 13 Januari 2019.

Wawancara dengan Darussalam, managing Partner Institusi Konsultan Pajak DDTC. CNBC Indonesia.

Wawancara yustinus. CNBC.

Sumber on-line

Anang Purnadi, Selebgram Sudah Seharusnya Bayar Pajak, (Pegawai Direktorat Jendral Pajak), On-Line, tersedia di: <https://pajak.go.id/artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak> (06 Desember 2019).

Andina Librianty, "Soal Pajak Selebgram Ini Kata Sri Mulyani" (On-line), tersedia di: <https://www.liputan6.com/tekno/read/3875379/soal-pajak-selebgram-ini-kata-sri-mulyani>, (14februari 2020).

"Endorsement dalam Pemasaran Online dan Kelebihannya" (On-line), tersedia di: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/10/16/322659/endorse_dalam_pe_masaran_online_dan_kelebihannya/ (15 Februari 2020).

"Endorsement dalam meningkatkan penjualan" (On-line), tersedia di: <https://www.jurnal.id/id/blog/2018endorsementdapatmeningkatkanpenjua-bisnis-online/> (05 Maret 2020).

“Influencer” (On-line), tersedia di: <https://kumparan.com/sociabuzz-influencer-marketing-platform/apa-itu-influencer-marketing>. 12 Maret 2020).

Nahimunkar, “*Pajak Dalam Islam*” (On-line), tersedia di: <https://www.nahimunkar.org/pajak-dalam-islam-2/> (20 November 2019).

“Pajak” (On-line), tersedia di: <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-bisnis-endorsement/> (6 september 2019).

“Pengertian Endorsement dan Manfaat Endorsement”, (On-line), tersedia di: <https://www.nesabamedia.com/pengertian-endorse/> (23 Maret 2020).

“Selengram” (On-line), tersedia di: <https://www.ibigacademy.com/apa-itu-selebgram-asal-usul-endorse/> (3 september 2019).

“*Selebgram*” (On-Line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> (12 Januari 2020).

“Tarif Endorse Raff Ahmad di Medsos”, (On-line), tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/2019101908283033108301/biki-melongo-ini-tarif-endorse-raffi-ahmad-di-medsos>. (23 Maret 2020).

Yorika Vanbora, “Youtubers dan Selebgram Sebagai Wajib Pajak di Era Modern” (Online), tersedia di: <https://www.pajakku.com/read/5dc3f8b5387af773a9e01115/Youtuber-&-Selebgram-sebagai-Wajib-Pajak-di-Era-Modern> (15 Februari 2020).